

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 94 TAHUN 2011

Oleh

JOKO SETIA PUTRA

Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2011 (Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor) ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai tata cara pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Implikasi yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi tersebut. Tetapi dalam implementasinya masih berjalan kurang baik, terbukti dengan belum tercapainya target retribusi, masih minimnya sosialisasi, dan masih sering terjadi pungutan liar. Pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan bermotor (UPT PKB).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif bertipe deskriptif, dengan teknik pengumpulan data seperti : teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Lokasi penelitian ini terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB). Fokus penelitian diambil dari Model Implementasi George C. Edward III, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2011 (Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor), komunikasi belum berjalan baik, sumber daya manusia yang minim secara jumlah dan kecakapan, fasilitas tidak memadai, dan adanya pelanggaran petugas. Kesimpulannya adalah Implementasi Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2011 (Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor) berjalan kurang baik. Untuk pelaksanaan akan datang, peneliti memberikan saran yaitu : berkoordinasi dengan Pemerintah Kota

terkait target, berkoordinasi dengan daerah lain terkait kendaraan bermotor berplat Kota Bandar Lampung yang berada di daerah tersebut, mengajukan anggaran pendidikan pelatihan bagi para petugas, memberi sanksi kepada petugas yang melakukan pelanggaran, dan melaksanakan pengawasan terhadap kendaraan yang tidak laik jalan.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2011